BANK SUNGAI PUA SYARIAH
PT. BPR Syariah Sungai Pua

LAPORAN KEBERLANJUTAN

T A H U N 2 0 2 5

PT. BPRS SUNGAI PUASYARIAH
Jl. Raya Sungai Pua No. 6 Kampuang Gobah Tangah Koto , Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam
Telp./Fax. (0752) 691200 HP 0852-9000-0204, email: bprsungaipuar@gmail.com

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Di tahun 2025, BPRS SUNGAI PUA telah melaksanakan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2025 sesuai POJK No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. BPRS SUNGAI PUA menerapkan program- program kerja yang disusun dalam RAKB sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

BPRS (Bank Perekonomian Rakyat Syariah) sebagai salah satu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) menyadari pentingnya isu pengelolaan keuangan berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip *triple bottom line* yaitu *people* (kesejahteraan masyarakat), *profit* (keuntungan) dan *planet* (lingkungan hidup) dalam kegiatan usaha Bank dengan menyelaraskan aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST).

BPRS SUNGAI PUA sebagai lembaga perantara *(intermediary institution* yang menghimpun dana pihak ketiga (DPK) dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat dituntut untuk bisa selektif dalam memberikan pembiayaan kepada calon debitur dengan menghindarkan pada kegiatan usaha yang dapat merusak lingkungan hidup, fokus pada usaha debitur yang dapat meningkatkan kesejahateraan masyarakat dan sekaligus juga BPRS mendapatkan keuntungan dari pendapatan margin pembiayaan.

Dalam hal ini BPRS SUNGAI PUA berkomitmen untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan sebagai langkah bersama bagi Sektor Jasa Keuangan dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah menyangkut Keberlanjutan Bank sebab ketidakpedulian terhadap isu lingkungan hidup dan sosial dapat meningkatkan risiko bagi Perbankan khususnya peningkatan risiko pembiayaan akibat kegagalan bayar *(default)* debitur yang memiliki usaha berdampak negatif terhadap lingkungan dan kontraproduktif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Keberlanjutan (SR - *Sustainability Report*) BPRS SUNGAI PUA Tahun 2025 ini berisi informasi mengenai kinerja keberlanjutan Bank dalam bidang ekonomi, lingkungan maupun sosial kepada seluruh pemangku kepentingan. BPRS SUNGAI PUA dengan modal inti kurang dari Rp 50 milyar, sebagaimana ketentuan dari OJK untuk kedua kalinya menyusun Laporan Keberlanjutan di tahun 2026 yaitu Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 dan wajib disampaikan ke OJK secara parallel run yaitu melalui APOLO dan luring *(offline)* paling lambat sesuai dengan batas waktu paling lambat tanggal 30 April 2026. Dengan demikian BPRS SUNGAI PUA menyusun Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 yang memuat informasi untuk periode pelaporan 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Penyusunan Laporan Keberlanjutan ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan Pedoman Teknis Pedoman Teknis bagi Bank terkait Implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
BAGIAN I PENDAHULUAN DAN STRATEGI KEBERLANJUTAN **1**
BAGIAN II IKHTISAR KEBERLANJUTAN DAN KINERJA KEBERLANJUTAN **4**
A. Kinerja Ekonomi 4
B. Kinerja Lingkungan Hidup 4
C. Kinerja Sosial 4
D. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan..... 4
BAGIAN III PROFIL BANK **6**
BAGIAN IV PENJELASAN DIREKSI **7**
BAGIAN V TATA KELOLA KEBERLANJUTAN **9**
BAGIAN VI PENUTUP **13**

BAGIAN I
PENDAHULUAN DAN STRATEGI KEBERLANJUTAN

Sesuai POJK No. 51 /POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan pasal 10 secara substantif mewajibkan BPR/ BPRS untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan (LK) paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya. Untuk itu BPR/ BPRS wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan (LK) atau SR (Sustainability Report) Tahun 2025 ke OJK paling lambat tanggal 30 April 2026 bersamaan dengan Laporan Tahunan BPR/BPRS Tahun 2025.

Laporan Keberlanjutan Sustainability Report)adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Mengacu pada Lampiran 2 POJK Penerapan Keuangan Berkelanjutan bahwa format penulisan Laporan Keberlanjutan sebagai berikut:
1. Penjelasan Strategi Keberlanjutan
2. Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan (Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup)
3. Profil Singkat BPR/BPRS
4. Penjelasan Direksi
5. Tata kelola keberlanjutan
6. Kinerja keberlanjutan
7. Verifikasi tertulis dari pihak independen
8. Lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca dan
9. Tanggapan BPR/BPRS terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya

Acuan dan Standar Penyusunan Laporan Keberlanjutan
Laporan Keberlanjutan BPR BARINGIN PADANG PANJANG SAKATO tahun 2025 disusun dengan mengakomodir standar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Laporan Keberlanjutan ini tidak lepas dari laporan tahunan yang telah disusun dengan laporan keuangan teraudit untuk tahun buku 2025. BPRS Sungai Pua membuat dan melaporkan kinerja keberlanjutan dalam periode 1 (satu) tahun buku (tahunan) mulai tahun 2025 ini. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keberlanjutan BPRS Sungai Pua tahun 2025 ini memuat data dan informasi yang dikumpulkan dalam 1 (satu) tahun yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Prinsip penetapan konten dalam Laporan ini didasarkan pada POJK 51/ POJK.03/2017 dan disusun berdasarkan prinsip isi dan kualitas.

Prinsip isi meliputi:
1. Konteks berkelanjutan: Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) ini disusun sejalan dengan konteks keuangan berkelanjutan.
2. Kelengkapan: Informasi disajikan sebagai informasi kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan kelengkapan bagi pembaca.

Prinsip kualitas adalah:
1. Keseimbangan: Informasi terkait capaian dan prestasi, serta tantangan disampaikan sesuai dengan kondisi Bank.
2. Komparabilitas: Data yang disampaikan dalam laporan disajikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
3. Akurasi Angka dan informasi telah diperiksa secara internal Bank sehingga diyakini akurasinya.
4. Ketepatan waktu: Laporan ini disajikan tepat waktu bersama dengan Laporan Tahunan.
5. Kejelasan Informasi yang disajikan dalam laporan mudah untuk dipahami.

Topik material dalam Laporan ini adalah topik- topik yang telah diprioritaskan oleh organisasi untuk dicantumkan dalam laporan. Dimensi yang digunakan untuk menentukan prioritas, antara lain, adalah dampak bagi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dampak dalam Laporan ini termasuk di dalamnya yang bernilai positif. Penetapan aspek material dan batasan didasarkan pada isu-isu yang berpengaruh signifkan bagi BPRS Sungai Pua serta seluruh pemangku kepentingan.

Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, BPR mengacu pada 8 (delapan) prinsip keuangan berkelanjutan, dan 3 (tiga) prioritas sesuai POJK No. 51/2017. Delapan prinsip keuangan berkelanjutan yang dikembangkan oleh BPRS Sungai Pua adalah

1. Investasi yang bertanggung jawab; adalah pendekatan investasi yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam keputusan investasi yang bertujuan agar dapat mengelola risiko secara lebih baik. Kami menerapkan prinsip ini melalui pemberian kredit yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dengan menganalisis potensi risiko yang ditimbulkan dari usaha yang dibiaya oleh Bank.
2. Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan; Kami menerapkan prinsip ini dengan menuangkannya pada kebijakan keberlanjutan yang dituangkan dalam dokumen RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) yang menjadi landasan BPRS Sungai Pua dalam menjalankan bisnis berkelanjutan di kegiatan usaha Bank.
3. Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup ; Kami telah memiliki prinsip kehati-hatian (Prudential Banking) dalam mengukur risiko yang dikelola dalam Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) Bank. Selain risiko-risiko finansial, kami juga melakukan proses manajemen risiko khususnya mengukur risiko pemberian kredit atau pinjaman yang bersentuhan langsung dengan aspek sosial dan lingkungan hidup, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
4. Prinsip Tata Kelola; Kami menerapkan tata kelola keberlanjutan (ekonomi, lingkungan dan sosial) yang dibangun berdasarkan prinsip- prinsip penerapan GCG (Good Corporate Governance), yaitu transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan kewajaran.
5. Prinsip Komunikasi yang Informatif; Kami menyediakan laporan yang informatif mencakup strategi, tata kelola, kinerja dan prospek Bank yang dapat dengan mudah diakses oleh para stakeholder melalui situs web BPRS Sungai Pua https:// www.banksungaipuasyariah.co.id
6. Prinsip Inklusif; Bank menjamin ketersediaan dan keterjangkauan produk dan/ atau jasa yang dapat dengan mudah diakses oleh nasabah. Bank memastikan seluruh masyarakat memiliki akses yang mudah dan merata terhadap layanan yang keuangan BPRS Sungai Pua.
7. Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas ; Dalam menyusun program keberlanjutan, kami mempertimbangkan sektor- sektor unggulan prioritas yang telah kami tetapkan dalam RAKB (Rencana Aksi Keuangan Bank). Hal ini kami lakukan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan mendukung program pemerintah dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.
8. Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi; Kami membuka diri untuk berkomunikasi dan berkerja sama dengan lembaga atau pemerintahan setempat terkait Bisnis Berkelanjutan dalam rangka penyelarasan strategi keberlanjutan Bank. Hal ini terlihat dari keanggotaan perusahaan pada perbarindo dan partisipasi dalam mendukung kegiatan- kegiatan yang memberdayakan masyarakat.

Sedangkan tiga prioritas RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) adalah :

1. Pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan, antara lain mengidentifikasi dan memonitor portofolio pembiayaan Bank yang menunjang keuangan berkelanjutan.
2. Pengembangan kapasitas internal Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan meningkatkan awareness mengenai keuangan berkelanjutan (untuk pegawai dan nasabah), implementasi keuangan berkelanjutan pada sektor-sektor usaha yang menjadi fokus Bank.
3. Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/ atau standar prosedur operasional, antara lainmenyiapkan kebijakan Keuangan Berkelanjutan, penyesuaian kebijakan internal Bank lainnya seperti Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian, Kebijakan tata kelola keberlanjutan

Strategi keuangan berkelanjutan disusun berdasarkan pertimbangan visi dan misi Bank dalam implementasi keuangan berkelanjutan. Bagi Bank, penerapan keuangan berkelanjutan bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan, namun juga sebagai strategi untuk mewujudkan visi Bank khususnya dalam penerapan prinsip inklusi keuangan.

Segmen UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang menjadi sasaran utama Bank dalam pelayanan jasa keuangan diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi. Selain itu, melalui pengembangan produk dan/ atau jasa keuangan berwawasan lingkungan, Bank berupaya meningkatkan peran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs - Sustainable Development Goals) . Hal ini diwujudkan dalam berbagai upaya, di antaranya dengan menyusun rencana kerja, dan mengembangkan RAKB sesuai dengan ketentuan regulator.

Sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab dan Lingkungan Perseroan Terbatas, BPRS Sungai Pua mulai menerapkan prinsip- prinsip go green company sejak penerapan Keuangan Berkelanjutan dengan menjalankan kegiatan-kegiatan diantaranya :

1. Mengampanyekan efisiensi penggunaan air di setiap toilet yang berada di lingkungan kantor BPR dengan memasang pamflet ““Gunakan air seperlunya”, “Hemat air”, atau “Matikan air setelah selesai digunakan”.
2. Mengampanyekan lingkungan kerja menjadi lebih sehat dengan motto “BERSIH itu SEHAT” dengan memasang pamflet di tempat-tempat yang mudah terlihat. .
3. Menjalankan program “Hemat Energi” dengan pembatasan penggunaan AC dan listrik setelah jam kerja dan mematikan lampu di ruangan yang tidak digunakan.
4. Program penggunaan tumbler sebagai pengganti gelas air minum atau air dalam kemasan

BAGIAN II
IKHTISAR ASPEK KEBERLANJUTAN DAN KINERJA KEBERLANJUTAN

A. Kinerja Ekonomi

Total outstanding kredit/pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
Energi Terbarukan	0	0	0
Efisiensi Energi	0	0	0
Pencegahan dan pengendalian Polusi	0	0	0
Pengelolaan Sumber daya alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang berkelanjutan	0	0	0
Konservasi Keanekaragaman Hayati, Darat dan Air	0	0	0
Transportasi Ramah Lingkungan	0	0	0
Pengelolaan Air dan Limbah yang berkelanjutan	0	0	0
Adaptasi Perubahan Iklim	0	0	0
Produk Yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya Dan menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (Ecoefficient)	0	0	0
Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional	0	0	0
Kegiatan Usaha dan/ atau Kegiatan Lain yang berwawasan Lingkungan Lainyya	0	0	0
Kegiatan UMKM	15.349.622.193	15.717.956.406	15.753.259.917
Total Outstanding pembiayaan berdasarkan Kategori Usaha Berkelanjutan	15.349.622.193	15.717.956.406	15.753.259.917

B. Kinerja Lingkungan Hidup

Kinerja Aspek Sosial Terkait Inklusivitas Ketenagakerjaan Internal Bank

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
Penggunaan Bahan Bakar	14.383	17.675	18.496
Penggunaan Listrik	5.276	4.622	4.652
Penggunaan Air	1.080	850	780
Penggunaan Kertas	1.997	2.109	1.570

C. Kinerja Sosial

Kinerja Aspek Sosial Terkait Dana Kegiatan Sosial Serta Keanggotaan Pada Asosiasi

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
Realisasi Dana Untuk Kegiatan Sosial (Satuan Rupiah)	7.907.500	2.592.000	7.897.000
Jumlah Keanggotaan pada Asosiasi	3	3	3

D. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Sebagai entitas bisnis, senantiasa berupaya agar eksistensinya semakin maju dan berkembang. Salah satunya adalah dengan melakukan inovasi dan pengembangan produk dan layanan dengan memperhatikan perkembangan teknologi terkini yang sangat pesat sebagai faktor pendorong pergeseran perilaku masyarakat modern yang menginginkan kemudahan, rasa aman dan kenyamanan dalam bertransaksi perbankan.

Dalam melakukan inovasi, melakukannya dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan kebijakan perusahaan. Adapun inovasi dan pengembangan produk/ jasa yang dilakukan selama tahun 2025 antara lain Tabungan Thahira dan Qurban

BAGIAN III
PROFIL BANK

Informasi Umum

Komponen	:	Keterangan
Nama BPRS	:	PT. BPRS SUNGAI PUA
Alamat	:	Jl. Raya Sungai Pua No. 6 Kampuang Gobah Jorong Tangah Koto Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam
Jumlah Kantor Cabang/Kas	:	Memiliki 1 Kantor Kas
No telepon	:	0852 9000 0204
E-mail	:	bprsungaipuar@gmail.com
Website	:	www.banksungaipuasyariah.co.id

Skala Usaha

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
Aset	19,128,382.401	20.124.397.476	22.318.529.499
Pembiayaan	15.349.622.193	15.717.956.406	15.753.259.917
DPK			
Tabungan Wadiah	10,419,080.397	9.106.543.850	11.936.368.274
Deposito Mudharabah	4,994,450.000	5.851.550.000	4.751.050.000

Jumlah Pegawai

Sampai dengan Desember 2025 jumlah seluruh personal yang ada di BPRS Sungai pua terdiri dari :

1. Dewan Komisaris 1 (satu) Orang
2. Dewan Pengawas syariah 2 (dua0 Orang
3. Direksi 2 (dua) Orang
4. Pejabat Esekutif 4 (empat) Orang
5. Staff 16 (enam) belas orang

Produk Layanan

Adapun produk layanan yang dikelola adalah sebagai berikut :

Keterangan
1. Piutang
a. Piutang Murabahah
b. Piutang Multijasa
2. Pembiayaan Bagi Hasil
Musyarakah
3. Pembiayaan Sewa
4. Tabungan Wadiah
5. Dana Investasi Non Profit Sharing
Deposito

Profil Singkat Nilai Keberlanjutan

Visi :

Menjadi Bank berdaya saing tinggi dan kuat di Kabupaten Agam Tahun 2025 dengan memperhatikan keselarasan aspek keuangan berkelanjutan

Misi dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan :

1. Mewujudkan penerapan Keuangan berkelanjutan yang mampu mendorong kontribusi terhadap pembangunan nagari.
2. Pengembangan kapasitas internal yang sejalan dengan keuangan berkelanjutan.
3. Peduli terhadap kepentingan sosial dan lingkungan hidup.
4. Mendorong kemampuan manajemen risiko khususnya aspek sosial dan lingkungan hidup

BAGIAN IV
PENJELASAN DIREKSI

Kebijakan Untuk Merespon Tantangan Dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan
Bank berkomitmen untuk menerapkan nilai- nilai keberlanjutan dengan menjadi Bank yang terpercaya dan unggul dalam memberikan kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Nilai keberlanjutan tersebut diimplementasikan melalui strategi utama dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang selaras dengan kebutuhan strategis, integrasi aspek sosial dan lingkungan hidup ke dalam pengelolaan risiko, serta peningkatan pertumbuhan portofolio kredit atau pembiayaan pada kegiatan usaha berwawasan lingkungan, khususnya sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Sektor UMKM merupakan usaha produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu, dan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia khususnya menyerap tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

***Penerapan* Keuangan Berkelanjutan**
Sebagai upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), BPR menetapkan RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) dengan rencana 5 (lima) tahun sebagai Rencana Aksi dalam Jangka Panjang. Selain itu, Bank juga memiliki Rencana Aksi dalam Jangka Pendek (satu tahun) yang ditetapkan di tahun 2025.
Target yang ditetapkan oleh Bank yaitu pegawai telah mengikuti sosialisasi Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan menerapakan operasional Perbankan Hijau (green banking).
Laporan Keberlanjutan ini berisi komitmen, strategi dan kinerja pencapaian kami terkait Keuangan Berkelanjutan. Adapun komitmen kami adalah:
1. Penerapan prinsip kehati- hatian bank (prudential banking) dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usaha terutama dalam penyaluran pembiayaan.
2. Menjalankan operasional Bank yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
3. Pengembangan kompetensi staf pada pemahaman terhadap sosial dan lingkungan hidup serta penerapannya dalam setiap kegiatan usaha Bank.
4. Menerapkan perbankan yang inklusif dengan menyediakan dukungan akses keuangan bagi segenap masyarakat
5. Berpartisipasi dalam upaya bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Strategi Pencapaian Target
Bank senantiasa meningkatkan strategi keberlanjutan khususnya dalam memitigasi risiko yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan usaha Bank. Dalam penerapan keuangan berkelanjutan, BPR tidak terlepas dari berbagai risiko di antaranya risiko pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun, risiko tersebut telah dikelola secara optimal oleh Bank dengan berbagai upaya mitigasi yang dilakukan.

Tantangan utama saat ini di awal peletakan pondasi batu pertama keuangan berkelanjutan adalah komunikasi dan membuat para pemangku kepentingan sadar akan pentingnya penerapan keuangan keberlanjutan dalam operasional dan bisnis perusahaan. Namun demikian, kami sangat percaya bahwa ke depannya terdapat peluang penyaluran dana yang besar terkait dengan Keuangan Berkelanjtuan.

Selama tahun 2025, belajar untuk menjadi lebih baik dalam layanan keuangan berkelanjutan. Kami berharap adanya kolaborasi dan kemitraan dengan pemerintah, regulator dan asosiasi untuk menciptakan nilai tambah bagi ekonomi, lingkungan dan sosial dalam upaya mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, kedepannya akan terus menargetkan implementasi keuangan berkelanjutan, antara lain peningkatan pengetahuan semua jenjang organisasi mengenai keuangan berkelanjutan, menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada lingkungan dan sosial dalam operasional keseharian, mengembangkan produk keuangan berkelanjutan dan pada akhirnya meningkatkan portofolio produk keuangan berkelanjutan.

Dalam merealisasikan keuangan berkelanjutan, perlu adanya harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan serta permasalahan lingkungan lainnya yang menjadi tanggung jawab kita semua. Kami berpartisipasi memberikan konstribusi dalam mengurangi dampak negatif lingkungan dan sosial dari dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasional dan bisnis kami.

Apresiasi

BPR memberikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah bersama-sama berkontribusi dalam penerapan prinsip Keuangan Berkelanjutan dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami, menjadi kekuatan kami untuk mampu memberikan dan menciptakan nilai keberlanjutan bagi semua pihak. Harapan kami adalah seluruh pemangku kepentingan dapat terus memberikan dukungan serta kerja samanya agar kami mampu tumbuh secara berkelanjutan dan kerjasama yang baik dalam mengelola isu-isu keberlanjutan**.**

BAGIAN V
TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

A. Struktur Tata Kelola Berkelanjutan

Tata Kelola yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) bagi Bank merupakan suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan 5 (lima) Pilar Tata Kelola, yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) . Selain itu, GCG merupakan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang- undangan dan etika perbankan.

Struktur tata kelola tentang Kebijakan Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik, adalah sebagai berikut

1. RUPS adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang- Undang dan/ atau Anggaran dasar.
2. Dewan Komisaris; adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan Anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. Dewan pengawas Syariah adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus terkait dengan syariah
4. Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar

Dalam penerapan good corporate governance, Perseroan telah memiliki kerangka kerja (frame work) yang menggabungkan tiga hal yaitu Struktur Tata Kelola (Governance Structure) , Proses Tata Kelola (Governance Process) dan Hasil Tata Kelola (Governance Outcome). Kerangka kerja dan operasional ini diharapkan mampu memberikan hasil berupa perwujudan ekspektasi para pemangku kepentingan (stakeholders) secara berkesinambungan

1. Dewan Komisaris
   Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan mengacu kepada anggaran dasar Bank serta peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain sebagai berikut
   a. Memberikan persetujuan atas Kebijakan Keuangan Berkelanjutan yang merupakan salah satu kebijakan spesifik Bank.
   b. Memberikan persetujuan terhadap RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan)
   c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)
   d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan
2. Anggota Direksi
   Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi terkait dengan penerapan program Keuangan Berkelanjutan mengacu kepada anggaran dasar Bank serta peraturan perundang- undangan lainnya, antara lain sebagai berikut
   a. Menyusun dan mengusulkan ancangan kebijakan Keuangan Berkelanjutan berikut perubahannya kepada Dewan Komisaris.
   b. Menyusun dan mengusulkan RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) kepada Dewan Komisaris.
   c. Menyusun dan mengusulkan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) kepada Dewan Komisaris.
   d. Mengkomunikasikan RAKB kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank.
   e. Memantau Pejabat Eksekutif satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur Keuangan Berkelanjutan

Sebagai BPR (Bank Perekonomian Rakyat) yang memiliki modal inti di bawah Rp 50 milyar, BPRS Sungai Pua berkomitmen untuk menerapkan keuangan berkelanjutan sebagaimana

diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Penerapan keuangan berkelanjutan di BPRS sungai Pua secara umum menjadi tanggung jawab Direktur Utama sebagai pemimpin tertinggi namun dalam pelaksanaannya, Direktur Utama telah menugaskan Direktur Yang Membawahkan Fungsi (YMF) Kepatuhan yang membawahi Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai koordinator Tim Implementasi Keungan Berkelanjutan yang bertugas melakukan penyusunan, monitoring, dan penyampaian atas penerapan keuangan berkelanjutan.

Dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan penyampaian hasil pelaksanaan atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dalam bentuk Laporan Berkelanjutan dilakukan oleh Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai Koordinator Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan.

Adapun tugas dan tanggung jawab Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut

Ketua (Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan)

1) Memastikan bahwa Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan dan Unit Kerja Pengelola telah melaksanakan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2) Bersama-sama dengan Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan merekomendasikan hasil penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan hasil pemantauan Keuangan Berkelanjutan kepada Direksi sebelum disetujui oleh Dewan Komisaris.

Koordinator Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko)

1) Melakukan koordinasi dengan Ketua Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan dan seluruh anggota Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan serta Unit Kerja terkait hal- hal sebagai berikut: (a) Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB); (b) Pemantauan penerapan Keuangan Berkelanjutan; dan (c) Penyusunan Laporan Berkelanjutan;
2) Menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tugas dan tanggung jawab tersebut pada butir (i) di atas kepada Ketua Tim, Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan;
3) Menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Berkelanjutan sebelum batas akhir penyampaian sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku kepada Otoritas Jasa Keuangan

B. Struktur Organisasi dan Pengendalian Intern

Struktur Organisasi dan Pengendalian Internal

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
Jumlah Unit Kerja yang menangani Keuangan Berkelanjutan dan Pengendalian Risiko Iklim	1	0	0
Jumlah SPO Manajemen Risiko terkait Keuangan Berkelanjutan	0	0	0

C. Pengembangan Kompetensi Keuangan Berkelanjutan

Program Pengembangan Bagi Internal Bank Pada Setiap Level Jabatan

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Dewan Pengawas Syariah	0	0	0
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Dewan Komisaris	0	0	0
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Direksi	1	0	0

Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Pejabat Eksekutif	1	0	0
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Pegawai	1	0	0

Pembekalan dilakukan melalui pemberian pelatihan yang dilakukan dan dihadiri oleh seluruh anggota Tim. Materi yang disampaikan mencakup prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dan kategori kegiatan yang tergolong sebagai KUB. Dengan demikian, Bank berharap dapat mengembangkan portofolio produk yang termasuk dalam kategori KUB di masa mendatang

1. Sosialisasi Keuangan Berkelanjutan Tahap 1 sesuai POJK No. 51 yang dilakukan oleh Bagian Kepatuhan kepada SDM pada tanggal 27 Februari 2025 yang diikuti oleh 16 (enan belas) orang.
2. Sosialisasi program kerja implementasi keuangan berkelanjutan kepada seluruh SDM pada tanggal 20 Juni 2025 yang diikuti 16 (enan belas) orang.

D. Identifikasi Risiko Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Bank berupaya untuk mengintegrasikan pengelolaan risiko terkait aspek lingkungan dan sosial dalam manajemen risiko Bank, melalui penyusunan kebijakan perkreditan maupun prosedur terkait portofolio produk yang termasuk dalam Kategori Usaha Berkelanjutan (KUB). Kebijakan dan prosedur tersebut telah menjadi bagian dari rencana strategis keuangan berkelanjutan Bank yang ditargetkan dapat tersedia pada tahun 2025.

Untuk memastikan setiap program dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, Bank akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala

E. Keterlibatan dan Penjelasan Terkait Pemangku Kepentingan

1. Pemegang Saham

   Dalam penerapan keuangan berkelanjutan, peran pemegang saham menentukan arah strategis BPR melalui kewenangan dalam RUPS, penetapan target kinerja, Tingkat komitmen pemegang saham untuk lebih disiplin melaksanakan Keuangan Berkelanjutan
2. Pemerintah

   Peran pemerintah dalam penerapan keuangan berkelanjutan di BPRS penting karena pemerintah bertindak sebagai pembuat kebijakan, regulator, sekaligus penggerak ekosistem pembangunan ekonomi. Melalui peran ini, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan menerapkan prinsip keberlanjutan secara efektif tanpa mengabaikan kelangsungan usaha dan prinsip kehati-hatian
3. Otoritas

   OJK menerbitkan panduan teknis, contoh praktik, serta klasifikasi kegiatan usaha yang mendukung keberlanjutan. Materi ini membantu menerjemahkan konsep ESG ke dalam prosedur operasional sehari-hari
4. Akademisi
   - Dalam penerapan keuangan berkelanjutan, menambah pengetahuan dan referensi dari para akademisi yang akan dijalankan bank sehingga memiliki pendasaran ilmiah dan dapat terus disempurnakan.
   - Akademisi juga menghasilkan riset dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan yang dapat menjadi rujukan bagi BPRS dalam menyusun kebijakan
5. Praktisi

   Melakukan sharing experience dengan praktisi perbankan yang lebih awal dan berpengalaman dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan. Diharapkan Pengalaman dari bank atau lembaga lain membantu memahami pendekatan yang sudah terbukti berhasil, termasuk cara sederhana mengintegrasikan ESG tanpa membebani operasional
6. Pegawai

   Pegawai merupakan pelaku utama yang menentukan apakah kebijakan dapat berjalan atau hanya menjadi dokumen. Direksi dapat menetapkan strategi, namun pelaksanaan

sehari-hari berada di tangan account officer, analis pembiayaan, petugas operasional, manajemen risiko, hingga fungsi pendukung lainnya

7. Nasabah

   Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, nasabah bukan hanya penerima pembiayaan, tetapi juga partner yang menentukan dampak nyata dari kegiatan bank terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Apa yang dilakukan nasabah setelah memperoleh pembiayaan pada akhirnya membentuk kualitas portofolio keberlanjutan

8. Lainnya

   Asosiasi perbankan/ Perbarindo/ Himbarsi berperan sebagai wadah koordinasi dan berbagi praktik baik antar BPR/BPRS. Melalui forum ini, bank dapat memperoleh contoh implementasi termasuk melaksanakan gerakan menanam 1.000 pohon, mengikuti pelatihan bersama, dan menyuarakan kendala kepada regulator

F. Umpan Balik

Untuk terwujudnya komunikasi dua arah sekaligus penerapan evaluasi BPRS Sungai Pua yang bertujuan meningkatkan kualitas Laporan di masa mendatang, BPRS Sungai Pua menyediakan Lembaran Umpan Balik di bagian akhir laporan. Dengan lembaran tersebut, diharapkan pembaca dan pengguna laporan ini dapat memberikan usulan, umpan balik, opini dan sebagainya, yang sangat berguna bagi peningkatan kualitas pelaporan di masa depan.

BPRS Sungai Pua memberikan akses informasi seluas-luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan, dan investor serta siapa saja yang memberikan umpan balik (feedback) mengenai laporan keberlanjutan ini dengan menghubungi telephone atau email kami

Bagi BPRS dengan modal inti kurang dari Rp 50 Milyar penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 ini merupakan yang kedua kalinya. Untuk Laporan Keberlanjutan sebelumnya belum mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan, meskipun demikian Bank akan terus melakukan perbaikan agar dapat memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat bagi segenap pembaca.

BAGIAN VI
PENUTUP

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2025 telah disusun sesuai dengan POJK No.51/ POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Keberlanjutan Bank.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Ditetapkan di : Sungai Pua
Tanggal : 28 April 2026

Indra Jaya, S.H., M.E.	**Rio Hendriadi, S.E., M.M.**
Direktur Utama	Direktur